

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB V, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian adalah:

Dari determinan-determinan yang terdapat dalam variabel “gender”, variabel status sosial ekonomi”, variabel “kepala sekolah”, variabel “biaya pendidikan, “variabel guru”, “variabel pola asuh”, dan “variabel motivasi” terdapat determinan-determinan yang berkorelasi positif dan signifikan terhadap prestasi belajar tetapi ada juga determinan-determinan yang berkorelasi negatif dan tidak signifikan terhadap prestasi belajar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya gender yang signifikan dan mempunyai korelasi positif terhadap prestasi belajar. Sementara status sosial ekonomi, biaya pendidikan, kepala sekolah, guru, pola asuh, dan motivasi tidak signifikan terhadap prestasi belajar.

6.2. Saran

Memperhatikan hasil dan kesimpulan penelitian, saran akan difokuskan pada tiga hal yaitu:

- 1) Komunikasi antara sekolah dengan masyarakat

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, sekolah dan masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat berperan

dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Komunikasi menjadi penting artinya, dan hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif apabila diselenggarakan secara periodik dan konstruktif. Sekolah perlu membentuk satuan-satuan kerja misalnya satgas organisasi, satgas pembelajaran, satgas keuangan, guru pamong dan lain-lain untuk merespon aspirasi masyarakat. Sebaliknya sekolah perlu mensosialisasikan visi, misi dan program kepada masyarakat melalui Komite Sekolah. Dengan demikian terjadi komunikasi dua arah menuju penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

2) Profesionalisme Kepala Sekolah

Kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan baik yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif yang menumbuhkan semangat tenaga pendidik maupun peserta didik. Dengan kepemimpinan kepala sekolah diharapkan dapat memberikan dorongan serta memberikan kemudahan untuk kemajuan serta dapat memberikan inspirasi dalam proses pencapaian tujuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diterapkan dunia pendidikan, menuntut penguasaan kepala sekolah secara profesional. Untuk itu kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah dan berkesinambungan.

Peningkatan profesionalisme kepala sekolah perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana dengan memperhatikan permasalahan-

permasalahan dan keterbatasan yang ada. Kepala sekolah yang professional dituntut mengetahui kebutuhan dunia pendidikan, melakukan penyesuaian-penyesuaian agar pendidikan berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya peningkatan profesionalisme kepala sekolah merupakan proses menyeluruh serta harus dilakukan secara berkesinambungan. Musyawarah kepala sekolah (MKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS) merupakan media yang dikembangkan dalam pembinaan kemampuan professional kepala sekolah. Melalui MKS, KKKS dan PKKS serta MGMP dapat ditelaah bagaimana meyiiasi kurikulum yang padat serta mencari alternatif pembelajaran yang tepat serta menemukan berbagai variasi, metode dan media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran pengawas sekolah perlu ditingkatkan mengingat kepemimpinannya bersama kepala sekolah memiliki tanggungjawab terhadap perkembangan sekolah. Disamping itu peningkatan profesionalisme kepala sekolah dapat dilakukan melalui pendidikan program sarjana atau pasca sarjana baik bagi kepala sekolah maupun guru.

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

Manajemen keuangan merupakan salah satu kegiatan pokok yang menentukan yang menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah

secara efektif dan efisien, dengan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orangtua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi tersebut diharapkan akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pendayagunaan anggaran serta akuntabilitas kinerja pembiayaan pendidikan.

4) Pola asuh orangtua

Ada kecenderungan orangtua hendaknya lebih berperan aktif dalam membantu anak-anaknya ketika sedang belajar sehingga anak-anak dapat mencapai prestasi belajar yang lebih baik.

5) Status Sosial ekonomi

Pada umumnya semakin tinggi pendidikan orangtua maka prestasi belajar anak akan tinggi. Tetapi nampaknya saat ini ada kecenderungan bahwa walaupun pendidikan orang tua rendah tetapi anak-anak mereka dapat

mencapai prestasi belajar yang tinggi. Untuk itu hendaknya orangtua dengan pendidikan tinggi lebih memotivasi anak-anak mereka agar dapat mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi dari orangtua mereka, minimal sama dengan prestasi orangtua mereka.

- 6). Guru perlu membimbing siswa untuk meningkatkan motivasi siswa dengan melakukan dorongan-dorongan tertentu:
- Menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari materi yang diajarkan di sekolah dengan pendidikan lanjutan dan lapangan kerja.
 - Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti kompetisi baik di kelas maupun di luar kelas atau luar sekolah.
 - Menghindari situasi yang tidak menyenangkan yang berasal dari sikap guru.
 - Mengarahkan siswa untuk meningkatkan cara belajar dengan menggunakan langkah belajar yang efektif dan efisien.